



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
TAHUN 2021

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT TAHUN 2021



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005. Pada tanggal 16 Januari 2006 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat sudah beroperasi secara penuh dan merupakan instansi vertikal pertama yang melaksanakan tugas dengan menempati sewa gedung di Jln. Trikora Wosi No. 84 Manokwari hingga secara resmi menempati gedung kantor yang baru di Jln. Trikora Arfai II Logpon Manokwari sejak tanggal 29 Januari 2009.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat berkomitmen menjadi Aparatur Sipil Negara yang SMART dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga memberikan *good impact* terhadap kemajuan bangsa terlebih khusus bagi masyarakat Papua Barat.

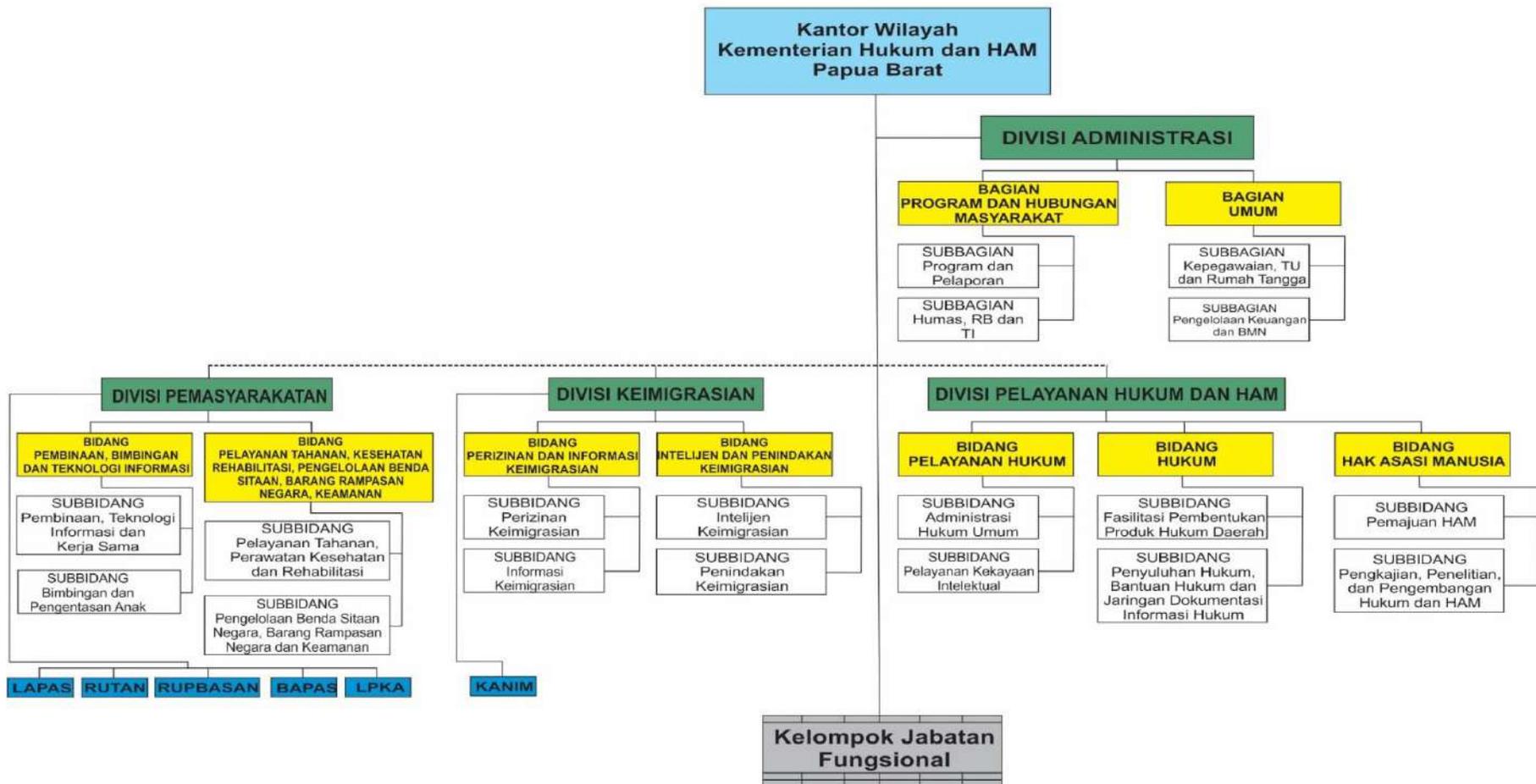
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah merancang/merencanakan serangkaian kegiatan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi bagi seluruh elemen.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 Kanwil Kemenkumham Papua Barat mengalami beberapa hambatan namun tidak mengurangi semangat Kami PASTI untuk merealisasikan tujuan mewujudkan pembangunan hukum dan pemenuhan serta pemajuan HAM yang berkePASTIan di Provinsi Papua Barat.

Sebagai bahan evaluasi dan informasi kepada masyarakat dan laporan kepada unsur pimpinan di tingkat pusat maka tersaji data kegiatan dan capaian keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing Divisi sebagai kontribusi dalam mendukung capaian keberhasilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

Struktur Organisasi kanwil Papua Barat (Permenkumham No 30 Tahun 2018)



PELAKSANAAN TUGAS DAN PROGRAM KERJA

A. Pelaksanaan Tugas

1. Divisi Administrasi

Dalam melaksanakan tugas telah memberikan pelayanan-pelayanan administrasi dengan sebaik-baiknya dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat maupun keseluruhan unit pelaksana teknis yang ada di Provinsi Papua Barat seperti, pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah, pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan, pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara, pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi, pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

a) Wilayah Kerja / Jumlah UPT

1. UPT Pemasarakatan :

- a. Lapas Kelas IIB (Manokwari, Sorong, Fak-fak) : 3 Unit Kantor
- b. Lapas Kelas III (Manokwari, Kaimana, Teminabuan): 3 Unit Kantor
- c. Rutan (Bintuni) : 1 Unit Kantor
- d. Balai Pemasarakatan (Sorong, Manokwari, Fak-fak) : 3 Unit Kantor
- e. RUPBASAN (Manokwari) : 1 Unit Kantor

2. UPT Keimigrasian

- a. Kantor Keimigrasian (Manokwari dan Sorong) : 2 Unit Kantor

c) Kantor

Telah menempati gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bpk. Andi Matalata) pada tanggal 29 Januari 2009, yang terletak di Jalan Trikora Logpon Arfai II Manokwari yang sekarang telah dirubah menjadi Jalan Brigjen (Purn) Marinir Abraham O. Atururi Arfai.

d) Sarana dan Prasarana

- Inventaris Tanah (terlampir)
- Inventaris Bangunan Gedung (terlampir)
- Inventaris Kendaraan Bermotor (terlampir)
- Inventaris Non KIB (terlampir)

e) Anggaran

➤ Pagu DIPA Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	TAHUN 2021 (RP)
1.	Kantor Wilayah	13.810.872.000
2.	Ditjen AHU	2.145.570.000
3.	Ditjen Pemasarakatan	1.341.596.000
4.	Ditjen Imigrasi	1.182.632.000
5.	Ditjen Hak Kekayaan Intelektual	1.012.823.000
6.	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	185.000.000
7.	Ditjen HAM	268.675.000
8.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	607.021.000
9.	Badan Penelitian dan Pengembangan HAM	237.509.000
10.	LP Kelas IIB Manokwari	7.350.668.000
11.	LP Kelas IIB Sorong	9.482.108.000
12.	LP Kelas IIB Fak Fak	5.346.309.000
13.	LP Kelas III Teminabuan	10.886.273.000
14.	LP Kelas III Kaimana	3.283.374.000
15.	LP Perempuan Kelas III Manokwari	4.153.721.000
16.	LP Khusus Anak Kelas II Manokwari	3.580.476.000
17.	Bapas Kelas II Sorong	2.313.119.000
18.	Kanim Kelas II Sorong	11.074.389.000
19.	Kanim Kelas II Manokwari	10.924.979.000
20.	Bapas Kelas I Manokwari	1.326.433.000
21.	Rutan Kelas IIB Bintuni	3.612.283.000
22.	Rupbasan Kelas I Manokwari	1.449.343.000
23.	Bapas Kelas II Fak Fak	1.326.433.000
Total		98.468.529.000

- f) Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat

9 Program Kanwil	Total		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen	13.810.872.000	13.342.356.004	96,61
Program AHU	2.145.570.000	1.611.783.300	75,12
Program Pemasyarakatan	1.341.596.000	1.340.403.200	99,91
Program Kemigrasian	1.182.632.000	1.161.139.660	98,18
Program KI	1.012.823.000	845.147.900	83,44
Program PP	185.000.000	164.553.300	88,95
Program Pemajuan HAM	268.675.000	219.250.900	81,6
BPHN	607.021.000	443.092.700	72,99
BALITBANG HAM	237.509.000	202.921.500	85,44
Total	20.791.698.000	19.330.648.464	86,9%

- g) Kegiatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat

Kegiatan yang dilaksanakan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat sejak pergantian Kepala Kantor Wilayah pada Bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 adalah sebagai berikut:

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Keadaan Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

No.	Unit Pelaksana Teknis	Kapasitas	Napi	Tahanan	Jumlah
1	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	21	20	5	25
2	Lapas Kelas IIB Fakfak	120	109	13	122
3	Lapas Kelas III Kaimana	100	52	5	57
4	Rutan Kelas IIB Bintuni	350	74	5	79
5	Lapas Kelas IIB Manokwari	120	277	57	334
6	Lapas Kelas III Teminabuan	120	32	2	34
7	LPKA Kelas II Manokwari	30	5	0	5
8	Lapas Kelas IIB Sorong	214	382	77	459
Jumlah		1075	951	164	1115

Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan:

a) Pelayanan Tahanan

Dalam poses pra adjudikasi, seorang tahanan yang didakwa melakukan pelanggaran hukum, diperlakukan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penempatan seorang tahanan harus dipisahkan dengan orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (narapidana). Namun dalam pelaksanaannya, Beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang ada saat ini, selain berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana (LAPAS) juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kondisi yang demikian menyebabkan kondisi pada Lapas Kelas IIB Manokwari, Lapas Kelas IIB Sorong dan Lapas Kelas IIB Fakfak mengalami kelebihan daya tampung (over kapasitas) penghuni yang berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan.

b) Pembinaan Narapidana

Mengingat kondisi Lapas, Rutan, dan LPKA yang over kapasitas penghuni, maka aspek keamanan menjadi perhatian yang serius. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas hunian se-wilayah Papua Barat adalah 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang sementara jumlah penghuni saat ini sebanyak 1129 (seribu serratus dua puluh Sembilan) orang. Kemudian apabila dibandingkan dengan jumlah petugas pengamanan yang ada tidak sebanding dengan jumlah hunian yang ada di Lapas/Rutan dan LPKA.

Rasio perbandingan dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	UPT	Kapasitas	Jumlah Penghuni	Jumlah Petugas Pengamanan	Perbandingan (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	21	25	19 Petugas	1:1
2	Lapas Kelas IIB Fakfak	120	122	45 Petugas	3 :1
3	Lapas Kelas III Kaimana	100	57	27 Petugas	1:2
4	Rutan Kelas IIB Bintuni	350	79	19 Petugas	2:8
5	Lapas Kelas IIB Manokwari	120	334	27 Petugas	1:17

6	Lapas Kelas III Teminabuan	120	34	20 Petugas	1:2
7	LPKA Kelas II Manokwari	30	5	16 Petugas	3:2
8	Lapas Kelas IIB Sorong	214	459	33 Petugas	1:13
TOTAL		1075	1115	206 Petugas	

Meskipun Lapas Klas IIB Sorong dalam kondisi over kapasitas, upaya-upaya pembinaan terhadap Warga Binaan tetap dilakukan. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan over kapasitas melalui percepatan pemberian bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB) berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Data pemberian PB, CB, dan CMB dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	UPT	Pemberian Hak-Hak WBP			Jumlah
		PB	CB	CMB	
1.	2	3	4	5	6
1.	Lapas Perempuan Kelas III	4	5	-	9
2.	Lapas Kelas IIB Fakfak	43	4	-	47
3.	Lapas Kelas III Kaimana	20	9	-	29
4.	Rutan Kelas IIB Bintuni	35	14	-	49
5.	Lapas Kelas IIB Manokwari	67	43	-	110
6.	Lapas Kelas III Teminabuan	7	14	-	21
7.	LPKA Kelas II Manokwari	5	2	-	7
8.	Lapas Kelas IIB Sorong	81	57	-	138
TOTAL		262	148	-	410

c) Pelarian Narapidana

REKAPITULASI PELARIAN NARAPIDANA/TAHANAN DI LAPAS/CAB.RUTAN/RUTAN
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
TAHUN 2021

No Urt	Nama,Napi.Tah,Reg,Hukuman, Ekspirasi sementara, jenis kejahatan	UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)								Ket
		Lapas Kaimana		Lapas Teminabuan		Rutan Bintuni		Lapas Sorong		
		Tgl. Lari	Tgl. Tangkap	Tgl. Lari	Tgl. Tangkap	Tgl. Lari	Tgl. Tangkap	Tgl. Lari	Tgl. Tangkap	
1	SAHRIL SIMORA (BIa/04/2021)	11-04-2021	28-05-2021							Telah bebas Murni
2	BAREN MANGGARA (BI-16/2021) (1 thn 6 bln) (2021)					25-03-2021	28-05-2021			-
3	ELDO ELKANA IMBIRI (BI-18/2020) (9 Tahun)					02-08-2021	03-08-2021			-
4	ALFRED HARA (BI-28/20210) (6 Tahun)					02-08-2021	03-08-2021			-
5	IRDO JEFRI A. WISEDO AIII-266/2020 Pencurian (363 KUHP) 30-12-2020							18 JANUARI 2021	-	Menjebol tembok kamar
6	DAVID WONSIWOR AIII-267/2020 Pencurian (363 KUHP) 20-12-2020							18 JANUARI 2021	-	Menjebol tembok kamar
7	DEDY GODLOB THESIA BI-179/2020 Pencurian (363 KUHP) 01-12-2022							18 JANUARI 2021	-	Menjebol tembok kamar



8	FERNANDO IBRAHIM RUMADAY BI-94/2020 21-02-2024							22 AGUSTUS 2021	17 September 2021	Lari melalui tembok lapas Ditempatkan di strapcel 5
9	HASAN LAHMADI BI-87/2020 30-09-2031							31 MEI 2021	-	Menjebol tembok kamar
10	SUARDI HASAN BI-216/2019 21-04-2034							31 MEI 2021	-	Menjebol tembok kamar
11	AMIR WIJARNAKO BI-53/2021 14-02-2025							31 MEI 2021	-	Menjebol tembok kamar
12	BOTAK BI-88/2020 03-07-2024							27 NOVEMBER 2021	-	Lari saat menjalankan asimilasi



d) Pembinaan Klien

Tugas pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Klien Pemasyarakatan) diemban menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan Klas I Manokwari dan Balai Pemasyarakatan Klas II Sorong.

Keadaan Klien Pemasyarakatan berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Anak yang diputus Hakim untuk dipulangkan ke orang tua/wali	-	
2	Anak yang diputus Hakim menjadi Anak Negara (AN)	-	
3	Pidana Bersyarat	1	
4	Pembebasan Bersyarat (PB)	151	
5	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	
6	Cuti Bersyarat (CB)	35	
7	Litmas untuk Pengadilan Negeri	-	
8	Litmas untuk Pembinaan Luar Lapas	-	
9	Sidang Anak Pengadilan Negeri	99	
TOTAL		286	

e) Perawatan BASAN BARAN

Untuk kepentingan proses peradilan, barang bukti berupa benda sitaan (Basan) dan benda rampasan (Baran) yang digunakan untuk melakukan kejahatan disita dan disimpan di Rupbasan.

Keadaan Basan/ Baran pada Rupbasan Klas I Manokwari sebagai berikut:

NO.	JENIS	JUMLAH	STATUS	KET
1	2	3	4	5
1.	Mobil	2 unit	Baran	Dirampas Untuk Dilelang
2.	Kayu	176 batang	Baran	
3.	Bensin	56 drum 66 jerigen	Baran	
4.	Kacang Tanah	47,5 karton	Baran	

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II Sorong menyangkut bidang fasilitatif maupun substansif dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan peraturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II Sorong dengan tetap berpedoman pada tugas pokok keimigrasian dengan memperhatikan aspek pelayanan, keamanan dan penegakan hukum. Dalam fungsi penegakan hukum terhadap orang asing, pemegang dokumen keimigrasian seperti disebutkan di atas termasuk crew asing penangkap ikan pemegang izin keimigrasian dan kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia khususnya Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki izin masuk tetap dikenakan tindakan keimigrasian sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelayanan Keimigrasian:

a. Pelayanan SPRI

Data pelayanan, pemberian SPRI dari Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II Sorong di Papua Barat untuk WNI dan WNA sebagai berikut:

1) Pemberian Paspor RI 48 Halaman

Jenis paspor ini dipergunakan untuk keperluan keluar negeri tidak untuk bekerja, jumlah paspor yang telah diterbitkan sebanyak 678 paspor pada Kanim Kelas II Manokwari dan pada Kanim Kelas II Sorong sebanyak 1.049 paspor.

2) Pemberian Paspor RI 24 Halaman

Jenis paspor ini untuk keperluan keluar negeri dalam rangka bekerja. Selama tahun 2021 belum ada paspor yang diterbitkan.

No	Unit/Satker	Paspor		Ket
		24 Halaman	48 Halaman	
1	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	-	678	
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	-	1.049	
JUMLAH		-	1728	

b. Pelayanan ITAS/ITAP

Pelayanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pada Kanim Kelas II Manokwari dan Kanim Kelas II Sorong diberikan kepada Warga Negara Asing yang menetap di Wilayah Indonesia khususnya di Papua Barat. Jumlah pemberian ITAS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Unit/Satker	Pelayanan		Ket
		Kitas Baru	Perpanjangan Kitas	
1	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	11	33	ITAS 6 BLN
		11	766	ITAS 1 THN
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	14	1	ITAS 6 BLN
		13	30	ITAS 1 THN
JUMLAH		49	830	

c. Lalu Lintas Orang Asing

Data lalu lintas WNI dan WNA dari dan keluar negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara adalah sebagai berikut:

No	Unit/Satker	Tempat Pemeriksaan Imigrasi				Ket
		Masuk Indonesia		Keluar Indonesia		
		Wni	Wna	Wni	Wna	
1	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	1753	1402	1363	1400	
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	112	114	535	148	
JUMLAH		1865	1516	1898	1548	

d. Pemberian Tindakan Keimigrasian

Data Tindakan Kemigrasian WNI dan WNA adalah sebagai berikut:

No.	UNIT/SATKER	JUMLAH PEMBERIAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN			
		TAK		PRODJUSTITIA	
		2021	2022	2021	2022
1.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	4	2	-	-
2.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	6	-	-	-
Total		10	2	-	-

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

a. Pelantikan Notaris

Selama tahun 2021 telah diadakan pelantikan Notaris sebanyak 3 kali.

b. Pelayanan kewarganegaraan

Selama tahun 2021 terdapat 1 (satu) satu pemohon yang dilantik atau mengucapkan janji dan sumpah menjadi WNI.

c. Kenotariatan

Sampai dengan saat ini jumlah Notaris se-Provinsi Papua Barat sebanyak 37 orang. Jumlah ini tersebar diseluruh Kota dan Kabupaten se-Papua Barat. Berikut jumlah Notaris pada Kabupaten/Kota yang masuk dalam Wilayah Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat:

No	Wilayah Kerja Notaris (Kabupaten/Kota)	Jumlah Notaris	Ket
1	Kota Sorong	16 Notaris	
2	Kabupaten Sorong	9 Notaris	
3	Kabupaten Manokwari	7 Notaris	
4	Kabupaten Fak-fak	1 Notaris	
5	Kabupaten Kaimana	1 Notaris	
6	Kabupaten Teluk Bintuni	2 Notaris	
7	Kabupaten Raja Ampat	1 Notaris	
8	Kabupaten Sorong Selatan	-	
9	Kabupaten Maybrat	-	
10	Kabupaten Tambrauw	-	
11	Kabupaten Teluk Wondama	-	
Jumlah		37 Notaris	

d. Pelayanan HKI

Permohonan HKI Tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

No	Jenis Pendataan KI	Jumlah Notaris	Ket
1	Merek	22	
2	Hak Cipta	261	
3	Paten	3	
4	Desain Industri	-	
5	Kekeyaan Intelektual	-	
6.	Rahasia Dagang	-	
7.	Indikasi Geografis	-	
Jumlah		286	



e. Hak Asasi Manusia

Pada tahun 2021 telah di bentuk 50 POS Pengaduan HAM yang di Buka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly). Hingga saat ini belum bertambah dan Jumlah Pengaduan HAM pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus dan tidak terlaksana program aksi HAM sehingga tidak ada predikat Kota/Kab peduli HAM pada tahun 2020.

f. Produk Hukum

Selama tahun 2021, 18 Rancangan Peraturan Daerah berhasil di harmonisasi, terinventarisirnya Ranperda yang berasal dari Provinsi, Kab/Kota se-Papua Barat. (*terlampir*)





B. PROGRAM KERJA

Program kerja yang telah, belum dan akan dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat adalah sebagai berikut:

a) Divisi Administrasi

Program Kerja yang telah dilaksanakan yakni:

- 1) Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja 2021.
- 2) Koordinasi, Konsultasi dan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran
- 3) Supervisi Pagu Indikatif dan Hasil RKA-K/L Pagu Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah
- 4) Penyusunan Usul Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja Pagu Alokasi Anggaran T.A 2022
- 5) Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan
- 6) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian
- 7) Bapperjakat Eselon IV dan V
- 8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 9) Pelaksanaan Ujian Dinas Tk I, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penilaian JFT
- 10) Pembinaan dan Pengelolaan BMN
- 11) Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
- 12) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 13) Pembentukan TIM ZI.
- 14) Pendampingan dan Penguatan satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM di Jajaran Kanwil.
- 15) Penguatan SDM.
- 16) Pelaksanaan Pemberkasan, Ukur Tinggi, SKD dan SKB dalam Penerimaan CPNS 2021.
- 17) Pelaksanaan SKD, Tes Kesehatan dan Psikotes CATAR 2021.

Program kerja yang belum/akan dilaksanakan yakni:

- 1) Penghapusan BMN
 - 2) Penyusunan RKBMN Tahun 2022.
- 

b) Divisi Pemasyarakatan

Program kerja yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Pembinaan Satuan Tugas Kemanan dan Ketertiban
- 2) Sidang TPP
- 3) Pemberian Remis
- 4) Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Papua Barat
- 5) Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi
- 6) Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 7) Pencegahan dan Penindakan Kamtib
- 8) Mutasi/Pemindahan
- 9) Monitoring & Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Program kerja yang belum/akan dilaksanakan yakni:

- 1) Dikumjakpol
- 2) Pameran

c) Divisi Keimigrasian

Program Kerja yang telah dilaksanakan yakni:

- 1) Koordinasi Tim PORA
- 2) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Timur
- 3) Operasi Mandiri Wilayah Timur
- 4) Operasi Gabungan Wilayah Timur
- 5) Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsi Keimigrasian
- 7) Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dalam Wilayah Provinsi Papua Barat.
- 8) Melakukan pelayanan pembuatan paspor bagi masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II Sorong.



Program kerja yang belum/akan dilaksanakan yakni:

-

d) Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program Kerja yang telah dilaksanakan yakni:

- 1) Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah;
- 2) Inventarisasi, Klasifikasi Perda;
- 3) Kajian Peraturan Daerah;
- 4) Penyusunan Naskah Akademik;
- 5) Inventarisasi Prolegda;
- 6) Pembinaan Perancang PUUan;
- 7) Penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual
- 8) Melaksanakan Promosi Dan Diseminasi Kekayaan Intelektual
- 9) Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Di Wilayah
- 10) Layanan Ahu Pada Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham
- 11) Peningkatan Layanan Ahu Di Wilayah
- 12) Penyebaran Informasi Layanan AHU di Wilayah
- 13) Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris

Program kerja yang belum/akan dilaksanakan yakni:

- 1) Penilaian Angka Kredit
- 2) Penilaian Kota Peduli HAM
- 3) Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- 4) Fasilitasi Produk Hukum Daerah (PP)

C. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat antara lain:

1. Kakanwil Mendapat Penghargaan Karya Dika Madya Dari Menkumham Berkat Inovasi Layanan POS Pengaduan HAM Di 50 Denominasi Gereja Di Manokwari Dan Mendapat Penghargaan dari MENPAN–RB Dalam Ajang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.
 2. Kakanwil terima penghargaan atas Layanan POS Pengaduan HAM Di 50 Denominasi Gereja Di Manokwari Pada Upacara HDKD Tahun 2020 Secara Virtual.
- 

- 
3. Kakanwil Terima Penghargaan Yang Diraih Kanwil Kemenkumham Papua Barat Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Belanja APBN Dilingkup Wilayah Kerja Provinsi Papua Barat.
 4. Pembuatan Aplikasi SIAGA Keamanan berbasis Online.
 5. Pembuatan Aplikasi E-Dhapus tentang proses Penindakan dan Penghapusan Digital berbasis Online.
 6. Kanwil Kemnekumham Papua Barat Raih terbaik ke III dalam Capaian Pelaksanaan Target Kinerja AHU Tahun 2020 untuk KATEGORI Meningkatnya jumlah pelapor pemilik mafaat (Benifical Ownership) di wilayah.
 7. Penyerahan 13 Sertifikat KI dan Indikasi Geografis serta Penyelesaian Sengketa Pencipta Lagu TANAH PAPUA.
- 

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat selama Tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain :

PERMASALAHAN	SOLUSI
Operator Penyusunan anggaran di satker merangkap bendahara dan merangkap di tusi lain sehingga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu, sehingga terkadang operator kanwil mengambil alih penyusunan anggaran namun terkendala data dukung pada satker tersebut.	Kanwil Mengusulkan penambahan pegawai di satuan kerja dan dikhususkan untuk penyusunan anggaran
Tidak Optimalnya evaluasi SOP dan Penyusunan Standar Pelayanan.	Kanwil melakukan inventarisir terhadap SOP dan Standar Publik yang perlu dilakukan Evaluasi
Tidak Optimalnya Evaluasi Jabatan	Kanwil melakukan inventarisir dan memberikan usulan terhadap jabatan yang akan di evaluasi
Tidak adanya kejelasan tentang kegagalan satuan kerja dari penilaian TPN	Penjelasan instrumen ketidakberhasilan satuan kerja dalam penilaian WBK WBBM
Tidak optimalnya kinerja JF Penyusun dan Perancang Undang-Undang, yang cenderung diperbantukan pada bidang lain	Perlu mengusulkan adanya aturan sehingga JF Penyusun dan Perancang bekerja optimal
Tidak optimalnya kinerja JF PK Bapas yang cenderung pemborosan anggaran (untuk transport)	Perlu dilaksanakan optimalisasi kelembagaan Bapas untuk digabungkan dengan lapas dan atau rutan
Belum optimalnya penyusunan ABK dilingkungan Kanwil	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan ABK di kanwil
Masih lemahnya Administrasi Penatausahaan BMN mulai dari Pembelian/Pengadaan, usulan PSP, sampai dengan penggunaan KIB dan KIR baik Kanwil maupun Satker yang mengakibatkan adanya penumpukan data di aplikasi namun secara fisik sebagian besar BMN nya tidak ada, hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi bagian Penganggaran, Pengadaan. Pencatatan dan pelaporan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag BMN melakukan Inventarisasi BMN mulai dari Aset yang besar sampai yang kecil 2. Untuk BMN yang fisiknya tidak operator berkoordinasi dengan PPK dalam memproses usulan Penghapusan 3. Subbag BMN melakukan stock opname minimal setiap 6 bulan, lalu laporkan kepada Kakanwil

Masih terdapat beberapa Sertifikat Kepemilikan Tanah baik Kanwil maupun Satker yang masih menggunakan nama Departemen Kehakiman	Subbag BMN Kanwil maupun Satker melakukan koordinasi dengan pihak KPKNL dan Kementerian Pertanahan untuk balik nama sertifikat tanah tersebut menjadi an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM RI
Di Kanwil maupun Satker masih terdapat Aset BMN yang kondisinya Rusak Ringan dan Berat	Subbag BMN sedang menginventarisir aset BMN untuk pengusulan penghapusan
Masih terdapat Aset BMN Barang Tidak Ditemukan (BTD)	a. Subbag BMN Kanwil maupun Satker sedang menginventarisir aset BMN untuk proses usulan penghapusan BMN yang masuk dalam kategori Barang Tidak Ditemukan (BTD) b. Kanwil sudah menindaklanjuti usulan Satker untuk permohonan pendampingan Reviuw APIP ke Itjen
Masih terdapat KDP baik di Kanwil maupun satker	Subbag BMN menginventarisir KDP untuk diusulkan dalam Penyusunan RKBMN dengan melampirkan Rekomendasi PU
Sarana dan Prasarana kerja pegawai belum optimal baik di Satker maupun di Kanwil	Subbag BMN menginventarisasi sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan kemudian diusulkan untuk pengadaan yang dilengkapi data pendukung untuk diusulkan dalam penyusunan RKBMN
Masih terdapat asset BMN yang bermasalah berkaitan dengan Hak Wilayah (Ulayat)	Subbag BMN bersama dengan Bidang Hukum di Kanwil berkoordinasi dengan KPKNL dan bidang Hukum Pemerintah Daerah
Masih kurangnya jumlah SDM dan pemahaman yang memenuhi persyaratan sebagai Administrasi atau Pejabat Perbendaharaan baik PPK, PPSPM, Bendahara maupun Pengelola Keuangan	Subbag Keuangan berkoordinasi dengan KPPN terkait Pelatihan maupun Uji Kompetensi Pejabat Perbendaharaan
Lemahnya Fungsi Pengawasan dan Pengontrolan terhadap Administrasi Keuangan yang dikarenakan adanya saling merangkap Tanggung Jawab	Subbag.Keuangan berkoordinasi dengan Kepala SATKER agar Pengelola Keuangan baik bendahara maupun Operator Keuangan tidak saling merangkap
Masih kurangnya pemahaman terkait Penyusunan Anggaran, Dirbushement Plan, Pelaksana Anggaran dan Pelaporan sehingga Target Realisasi Penyerapan Anggaran maupun Penilaian IKPA belum Optimal	Subbag Keuangan berkoordinasi dengan Pimpinan dan bagian Perencanaan agar saat penyusunan Anggaran dan Dirbushement Plan melibatkan Pejabat atau Pelaksana sebagai Pengambil kebijakan Pelaksanaan kegiatan

Masih lemahnya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dari Kanwil sebagai Pembina di Satker dikarenakan keterbatasan Anggaran	Subbag.Keuangan melalui Kabag Umum berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan terkait usulan Anggaran Monev Pembinaan Keuangan
Fasilitas bandwidth yang diberikan oleh pusat belum bisa digunakan secara optimal (jaringan internet sering putus)	Evaluasi terhadap limitasi bandwidth dan melakukan kontrol terhadap pengaturan jaringan.
Tidak adanya kegiatan diklat disetiap Kanwil	Kanwil mengusulkan kebutuhan diklat pegawai di setiap kanwil
Kurangnya SDM dan pemahaman tentang kearsipan (GNSTA)	Dibuatkan sosialisasi
Tidak adanya sarana dan prasarana pengelolaan arsip	Disediakan tempat penyimpanan arsip (ruang arsip dan tempat penyimpanan arsip sprti lemari/rak arsip dan lain sebagainya)
Belum adanya sosialisasi tentang penyusunan SKP terbaru	Dibuatkan sosialisasi
Kurangnya pemahaman(sosialisasi) pengisian aplikasi ANJAB ABK dan kebutuhan pegawai	Dibuatkan sosialisasi
Tidak adanya Pilihan penggunaan Absensi Mandiri atau Absensi Manual melalui Finger Print dalam Hal Pemutakhiran data absensi pegawai untuk perhitungan Tunkir Pribadi	Dalam Simpeg disediakan Menu tersebut
Pada SUMAKER terdapat 2 tahapan untuk surat disetujui yaitu proses untuk mendapatkan Qrcode dan Pasphrase sebagai legalitas sebuah surat yang di tangani oleh TU Sumaker	Dirampungkan menjadi 1 Proses untuk memperoleh Qrcode
Tidak bisa menghapus surat pada Sisumaker	Dibuatkan opsi untuk menghapus surat disertai dengan otorisasi

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adanya Peningkatan disiplin pegawai sehingga perubahan yang baik dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah.
2. Ada Peningkatan penyelenggaraan kehumasan serta hubungan kerja dengan seluruh awak media dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas.
3. Komitmen dan Kerjasama yang baik antar Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas, Administrator dan JFT/JFU sehingga Kantor Wilayah dapat memperoleh Capaian- capaian Luar Biasa baik dalam lingkup Daerah maupun Nasional.
4. Program kegiatan yang tidak terlaksana di karenakan pengaruh Pandemi Covid-19.

B. S A R A N

1. Untuk mendapatkan data pencapaian kinerja dari hasil kajian seluruh divisi, perlu dilakukan pemantauan, analisa dan evaluasi secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah.
2. Pimpinan perlu melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di Lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat agar dalam penyelenggaraan kegiatan tidak terjadi lagi perubahan jadwal sebagaimana telah dicantumkan dalam Kalender Kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan hendaknya disinkronisasikan mengenai jadwal baik di pusat maupun di wilayah agar tidak terjadi waktu yang bersamaan dalam pelaksanaan kegiatan yang berakibat tidak lancarnya penyelenggaraan kegiatan.

Manokwari, 6 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah,

SLAMET PRIHANTARA
NIP. 196403011987031001



LAMPIRAN



Sarana dan Prasarana
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
Data BMN

No	Kode Barang	Nama Barang	No Aset	Tgl. Perlh	Asal Perolehan	Rupiah Aset
	Merk Barang	Keterangan				
2010101001 (Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I)						
1	Tanah Persil	(4,676) Eselon II Kadiv	1	23-01-2007		3,875,071,000
2	Tanah Persil	(1,806) Eselon III	2	01-03-2008		1,328,954,000
3	Tanah Persil	(1,300) Eselon II Kakanwil	3	10-03-2008		894,095,000
2010104001 (Tanah Bangunan Kantor Pemerintah)						
1	Tanah Ged. Kantor Kanwil	(6,020) Gedung Kanwil	4	13-04-2006		5,122,117,000
2	Tanah Persil	(30,000) Raja Ampat	6	16-11-2010		558,600,000
3	Tanah	(96,800) Hibah Pemprov Papua Barat	8	2018	Pemprov Papua Barat	37,500,000,000
3010304003 (Stationary Generating Set)						
1	Saegent SA 30 DSL		1	12-12-2008		131,800,000
3020101001 (Sedan)						
1	Toyota		1	05-10-2006	APBN (Divisi Administrasi)	183,000,000
2	Toyota Vios		2	24-09-2007	Transfer dari Sekjen	201,606,200
3020102002 (Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang))						
1	Isuzu NHR 55 CO E2-1	Penyuluhan Hukum	1	23-11-2012	Transfer dari Sekjen	377,784,000
3020102003 (Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah))						
1	Toyota Inova		1	05-10-2006	APBN (Divisi Administrasi)	197,000,000
2	Toyota Rush 1.5 S F700RE		3	16-04-2012	APBN (Divisi Administrasi)	230,000,000
3	Toyota Rush 1.5 S F700RE		4	16-04-2012	APBN (Divisi Administrasi)	230,000,000
4	Nissan Terano Spirit S		5	31-12-2014	Transfer dari Sekjen	149,500,000
5	Toyota Avanza 1300 G		6	28-12-2007	Transfer dari Sekjen	110,355,000
6	Toyota Kijang KF83		7	31-12-2001	Transfer dari Sekjen	96,400,000
7	Toyota Kijang Innova V Luxury		8	29-12-2015	APBN (Divisi Keimigrasian)	339,377,500
3020104001 (Sepeda Motor)						
1	Yamaha 2P2		1	05-10-2006	APBN (Divisi Administrasi)	16,000,000
2	Yamaha 2P2		2	05-10-2006	APBN (Divisi Administrasi)	16,000,000
3	Honda Supra Fit		3	13-03-2007	APBN (Divisi Administrasi)	13,330,000
4	Honda NF 100 SLD		4	13-03-2007	APBN (Divisi Administrasi)	13,330,000
5	Honda NF 100 SLD		5	13-03-2007	APBN (Divisi	13,330,000

					Administrasi)	
6	Honda NF 100 SE		8	31-07-2008	APBN (Divisi Administrasi)	13,330,000
7	Honda NF 100 SE		10	31-07-2008	APBN (Divisi Administrasi)	13,330,000
8	Honda NF 100 SE		11	31-07-2008	APBN (Divisi Administrasi)	13,330,000
9	Yamaha SE88		14	25-04-2016	APBN (Divisi Keimigrasian)	19,630,000
10	Yamaha SE88		15	25-04-2016	APBN (Divisi Keimigrasian)	19,630,000
4010101001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen)						
1	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Kanwil	1	31-12-2007		7,197,549,000
4010104999 (Bangunan Gedung Instalasi Lainnya)						
1	Bangunan Gedung	Gardu Genzet	1	31-12-2008		95,332,000
2	Bangunan	Gudang	4	29-06-2015	CV. PASIFIK	8,750,000
4010113001 (Gedung Pos Jaga Permanen)						
1	Bangunan Pos Jaga	Bangunan Pos Jaga NUP 1	1	31-12-2008		9,533,000
2	Bangunan Pos Jaga	Bangunan Pos Jaga NUP 2	2	31-12-2008		9,533,000
4010201004 (Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen)						
1	Rumah Negara Gol.I/B		1	31-12-2007	Kepala Divisi Administrasi	576,863,000
2	Rumah Negara Gol.I/B		2	31-12-2007	Kepala Divisi Keimigrasian	525,400,000
3	Rumah Negara Gol.I/B		3	31-12-2007	Kepala Divisi Yankum	524,159,000
4	Rumah Negara Gol.I/B		4	31-12-2007	Kepala Divisi PAS	584,304,000
5	Rumah Dinas		5	31-12-2008	Kepala Kantor Wilayah	527,247,000
4010201007 (Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen)						
1	Rumah Negara Type C		1	31-12-2008	Kabid Hukum	403,205,000
2	Rumah Negara Type C		2	31-12-2008	Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian	349,037,000
3	Rumah Negara Type C		3	31-12-2008	Kabid HAM	349,037,000
4	Rumah Negara Type C		4	31-12-2008	Kabid Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi	403,205,000
5	Rumah Negara Type C		5	31-12-2008	Kabag Program dan Hubungan Masyarakat	349,037,000
4040104001 (Pagar Permanen)						
1	Pagar Tembok		1	31-12-2008		200,956,000
5010109002 (Jalan Khusus Kompleks)						
1	Jalan Kompleks		1	17-09-2010	Jalan Kompleks Rumah Negara	159,174,000

					Eselon II Kadiv	
2	Jalan Kompleks		2	02-07-2012	Jalan Kompleks Rumah Negara Eselon III	212,494,000
4010109001 (Bangunan Gedung Pertemuan Permanen)						
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Aula, Parkiran Mobil, Parkiran Motor, dan Tandon Air	1	31-12-2020	Penyelesaian Pembangunan KDP	7,086,281,364

PERMASALAHAN BMN BERUPA TANAH PADA KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT

- A. Terdapat aset tetap berupa tanah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat yang disajikan dalam neraca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun Anggaran 2021 belum menggambarkan kondisi dan nilai tanah yang sebenarnya.
- B. Setelah dilakukan inventarisasi data Barang Milik Negara diperoleh kondisi sebagai berikut :
1. Tanah belum bersertipikat : **3** persil terdapat di satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bintuni, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kaimana;
 2. Berstatus sengketa dengan pihak lain : **3** persil terdapat di satuan kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Sorong dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari;
 3. Tanah milik pihak lain yang digunakan dalam kegiatan operasional Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat : **1** persil terdapat di satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kaimana.

I. TANAH BELUM SERTIFIKAT

No.	Nama Satker/UPT	Alamat/Lokasi Bidang Tanah	Luas Tanah (M2)	Nilai Tanah (Rp)
1	Rutan Bintuni	Jl. Raya Bintuni KM 9 Kab. Teluk Bintuni	30.001	6.174.000.000
2	Kanwil Papua Barat	Wasai-Warsambim Kab. Raja Ampat	30.350	558.600.000
3	Lapas Kaimana	Jl. PTT-LP	1.048	646.043.000

II. TANAH BERSTATUS SENGKETA DENGAN PIHAK LAIN

No.	Nama Satker/UPT	Alamat/Lokasi Bidang Tanah	Luas Tanah (M2)	Nilai Tanah (Rp)	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Bapas Sorong	Jl. Kalasuat Malanu Kota Sorong	973	788.568.000	Sengketa	Tanah ini sengketa dgn pemilik hak ulayat. Belum ada tindak lanjut
2	Lapas Manokwari	Jl. SOWI 4	8.914	4.364.740.000	Sengketa	Sengketa terjadi dikarenakan tanah tersebut di tempati warga sekitar, yang meminta uang ganti rugi atau pelepasan adat atas tanah yang mereka tempati sekarang.
3	Lapas Manokwari	Jl. Pisang no. 36 Reremi	403	1.080.689.000	Sengketa	Bersengketa dengan pensiunan KEMENKUMHAM PAPUABARAT. Terjadi sengketa dikarenakan tanah tersebut beserta rumah dinas yang berdiri di atasnya di klaim sebagai milik dari salah satu pensiunan KEMENKUMHAM PAPUA BARAT

III. TANAH PERSIL BUKAN MILIK YANG DIGUNAKAN KEMENKUMHAM

No.	Nama Satker/UPT	Alamat/Lokasi Bidang Tanah	Digunakan untuk (Kantor/Rumah Dinas/Lainnya)	Pemilik Tanah/Pencatat Tanah (Pemprov/Pemkab/Pemkot/Instansi Lainnya)	Dasar Penggunaan Tanah (BA Pinjam Pakai, Dokumen Lain)	Status Pemakaian (Aktif/Tidak Aktif)	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Lapas Kelas III Kaimana	Jln. Brawijaya	Rumah Dinas	PEMKAB	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat	-	Belum Memiliki Sertifikat	

DATA HARMONISASI RANPERDA TAHUN 2021 - 2022

NO RANPERDA TAHUN 2021

- 1 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Kebudayaan Daerah;
- 2 Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua;
- 3 Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Afirmasi Pendidikan Putra Putri Asli Papua;
- 4 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- 5 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- 6 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Komisi Hukum Ad Hoc;
- 7 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kelitbangan dan Inovasi Daerah;
- 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Partai Politik Lokal;
- 9 Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- 10 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
- 11 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penetapan dan Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Papua Barat; dan
- 12 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tentang Pembentukan Dan Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua Barat;
- 13 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2041;
- 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, Badan Musyawarah Kampung Dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Provinsi Papua Barat; dan
- 15 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat.
- 16 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 – 2026; dan
- 17 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 – 2026.
- 18 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

POS Pengaduan HAM yang di bentuk oleh Kantor Wilayah Kemnetrian Hukum dan HAM Papua Barat dan PGGP Papua Barat saat ini tersebar di wilayah Kabupaten Manokwari untuk selanjutnya akan di lakukan penambahan pada Kabupaten lainnya di Papua Barat. Bukan hanya Pos Pengaduan HAM, Kanwil Kemenkumham Papua Barat juga mendirikan POS YAKOMNAS Pada seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Papua Barat.

Daftar 50 POS Pengaduan HAM

NO.	NAMA GEREJA	NAMA PENDETA	ALAMAT GEREJA
1.	GKI EFATA MANGGOAPI	Pdt. YUSUF INAURY, S.Th	Manggoapi
2.	GKI MARANATHA KOTA	Pdt. ETHA AYATANOY, S.Th., M.Si	Kota
3.	GKI SION SANGGENG	PDT. MAYA	Sanggeng
4.	GKI OTTOW GEISLER	PDT. SEPTINUS TITOHU, S.Th	Sanggeng
5.	GKI PETRUS AMBAN	PDT. ALBERT RUMAROPEN, S.Th	Amban
6.	GKI BAHTRA PASIRIDO	PDT. M.D. TOKORO, S.Th	Pasirido
7.	GKPB-MDC	PDT. TONNY SAMPARA	Jl. Serayu Sanggeng
8.	GPI-KP	PDT. FRANCISCO TATAMBIHE	Soribo
9.	GBGP-PB	PDT. DEREK SAMBERBORI	Reremi Puncak
10.	GSJA	PDT. MULYADI	Simpang 5 Prafi Sp 1
11.	GPPS	PDT. ELISABETH RAMPALIMBO	Lembah Hijau
12.	LPMI	PDT. ABIMELEK RUTH	Amban
13.	GKKD	PDT. RAMSES SITUMORANG	Marina
14.	BETHANY	PDT. FRANS TUPAMAHU	Fanindi
15.	GBI	PDT. ERWIN MAKALEW	Fanindi Pantai
16.	GSJA	PDT. MARKUS SIBURIAN	Arfai
17.	GKI EBEN HEIZER	PDT. W. SIBIAN, S.Th., M.MIS	Fanindi
18.	KEPALA SUKU BIAK	SAM INARKOMBU	Sanggeng
19.	GPPS	PDT. EDISON. RAMPOLINBO	Lembah Hijau
20.	GPGDI KARMELE	PDT. IYAY O. JEREMA	Reremi Pemda
21.	GKPAN ELLIBBOR	PDT. NIKOR I. WAHILATUAN	Amban
22.	GPKAI-MEWALULING	ZET WONGGOR	Warmare
23.	GPD-PB	PDT. SOLAMUNT REFU	Aroka li
24.	GKMI	PDT. DAVIS SEMET	Swapen
25.	GKAI MARANATHA	PDT. DR. MUSA OPUR, S.PDK., M.PD.K	Rendani
26.	GPKAI	LUKAS KOYANI	Masni
27.	GPDP	PDT ARNOLD YAWIBAI	Makwam

28.	GKPMI	PDT YUSTUS MANDIBONDIBO	Reremi Puncak
29.	GPDI	WILLAM YOHANA SILITONGA	Reremi Puncak
30.	GBI	PDT YASON BANA	Koyani
31.	GKP	PDT DANIEL RANTE	Mura Prafi
32.	PGGP-PB	EDDY TATJAR WAMBRAUW, S.PI	Sowi Gunung
33.	BKAG MANSEL	PDT ELISA IMBIRI, S.TH	Mansel
34.	GKPPI	PDT BILLY WAROY	Sowi Gunung
35.	GBI DOCK IV PRAFI	PDT SAMUEL SAOGO	Udapi Hilir/ Sp Iv
36.	KATOLIK	ANTONIUS MALIR	Jl. Brawijaya
37.	GKI	PDT SAYORI YAPEN	Sp Vii
38.	GPMTI	PDT ZEBLON MANDACAN	Sowi
39.	GPKAI	PDT ALPRIDON A.	Sp Vii
40.	GPDI	PDT RALAHALEN	Arfai
41.	GKII	PDT ANTON TUMONGLO	Amban
42.	GPDI	PDT YOWAS MANUFANDU, S.TH.	Abreso Mansel
43.	GPDP RANSIKI	PDT ELISA IMBIRI	Jl. S. Condronegoro
44.	GBI RANSIKI	PDT JHONFRI ISTIA	Jl. S. Condronegoro
45.	BKAG WAPRAMASI	PDT HENGKI WENGGE	Wapramasi
46.	GKP MANOKWARI	PDT YOSEP TOPAA	Jl. Drs. Esau Sesa
47.	DAP WIL III DOBERAY	PAUL VINCEN MAYOR	Jl. Lilinung Sanggeng
48.	DAP	THEO G. OBINARU	Sanggeng
49.	GPHI	PDT CRISTOM KAPISA	Reremi Palapa
50.	ADVENT	PDT HANS UBEY, S.AG	